

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA KANGEAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AHDIYAT ILMAWAN NEHRU, S.H.I., M.H.**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **753283**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/85 m2 di BANYUWANGI,
HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 32.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA CB 150R SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 19.000.000
3. LAINNYA, THRILL SEPEDA GUNUNG MTB Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 56.250**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 482.056.250**III. HUTANG** Rp. 460.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 22.056.250

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 September 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.